

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 186 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Menimbang

: a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 serta telah ditetapkannya susunan organisasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu kembali menuniuk Peiabat Pengelola Informasi Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 tentang Penetapan Peraturan 2007 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 5. Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4757) Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
- Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);
- 13. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:
- 14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim, dan Standardisasi Honorarium Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- 15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENGUSAHAAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM **INFORMASI TENTANG PEJABAT** PENGELOLA DAN **DOKUMENTASI** BADAN **PENGUSAHAAN** KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETIGA

: PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Arsiparis:
- b. Pranata Komputer;
- C. Pranata Humas; dan
- d. Pustakawan.

KEEMPAT

: PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KELIMA

: Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengganti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

- 1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- Para Anggota Badan Pengusahaan Batam;
- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Biro Umum;
- 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol; dan
- 7. Kepala Satuan Pemeriksa Intern.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 17 September 2020

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor

: 186 Tahun 2020

Tanggal

: 17 September 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT KERJA/UNIT USAHA	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
3.	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
4.	Anggota Bidang Kebijakan Strategis	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
5.	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
6.	Anggota Bidang Pengusahaan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
7.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Atasan PPID
8.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Ketua PPID
9.	Kepala Bidang Teknologi Informasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
10.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
11.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
12.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
13.	Kepala Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Antar Lembaga	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT KERJA/UNIT USAHA	JABATAN DALAM PPID
14.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	Biro Umum	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
15.	Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa
16.	Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum	Biro Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa
17.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Konsultasi Hukum	Biro Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa
18.	Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Petugas Dokumentasi
19.	Staf Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	Biro Umum	Petugas Dokumentasi
20.	Staf Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Petugas Informasi
21.	Staf Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Antar Lembaga	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	Petugas Informasi
22.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	PPID Unit Kerja
23.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum	Biro Hukum	PPID Unit Kerja
24.	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan	PPID Unit Kerja
25.	Kepala Sub Bagian Media Promosi	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol	PPID Unit Kerja
26.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kantor Perwakilan	PPID Unit Kerja
27.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	PPID Unit Kerja
28.	Kepala Sub Bagian Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Pusat Harmonisasi Kebijakan	PPID Unit Kerja
29.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha	Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK	PPID Unit Kerja

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT KERJA/UNIT USAHA	JABATAN DALAM PPID
30.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi	Direktorat Pengelolaan Lahan	PPID Unit Kerja
31.	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan	Direktorat Infrastruktur Kawasan	PPID Unit Kerja
32.	Kepala Seksi Perizinan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	PPID Unit Kerja
33.	Kepala Seksi Patroli dan Pengamanan Lingkungan	Direktorat Pengamanan Aset	PPID Unit Kerja
34.	Kepala Sub Direktorat Analisis Strategi Restrukturisasi Unit Usaha	Direktorat Restrukturisasi	PPID Unit Kerja
35.	Kepala Sub Direktorat Inisiatif Strategi dan Managemen Resiko	Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko	PPID Unit Kerja
36.	Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama Pengusahaan	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian	PPID Unit Kerja
37.	Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Pengadaan (Bandar Udara Hang Nadim Batam)	Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PPID Unit Kerja
38.	Asisten Manager Pelatihan Teknologi Informasi dan Jasa Lainnya (Teknologi Informasi Komunikasi)	Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PPID Unit Kerja
39.	Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Pengadaan (Pelabuhan Penumpang)	Badan Usaha Pelabuhan	PPID Unit Kerja
40.	Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Pengadaan (Pelabuhan Barang)	Badan Usaha Pelabuhan	PPID Unit Kerja
41.	Kepala Seksi Umum	Badan Usaha Rumah Sakit	PPID Unit Kerja

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT KERJA/UNIT USAHA	JABATAN DALAM PPID
42.	Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Pengadaan (Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan)	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
43.	Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Pengadaan (Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman)	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
44.	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksa Intern	PPID Unit Kerja

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Filt. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi